



Komitmen Tindaklanjuti Rekomendasi BPK

PONTIANAK - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Barat menyerahkan laporan hasil pemantauan tindaklanjut hasil pemeriksaan dan pemantauan kerugian negara/daerah semester I Tahun 2019 kepada pemerintah kabupaten/kota se-Kalbar di Aula BPK Perwakilan Provinsi Kalbar, Kamis (11/7).

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengatakan dari hasil pemantauan, ada beberapa item yang masih perlu penyempurnaan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak.

“Tindak lanjut ini berkaitan dengan hasil temuan yang lalu dan harus kita selesaikan,” kata Edi.

Menurut Edi, temuan lama ini kendala yang dihadapi adalah dikarenakan berkaitan dengan permasalahan hukum, baik yang masih berlangsung atau yang sudah inkrah. “Kalau masalah administrasi, saya yakin bisa kita selesaikan,” sebutnya.

Terkait dengan persoalan hukum dan pengembalian kerugian daerah, diakuinya belum bisa tercapai 100 persen. Terutama tindak lanjut rekomendasi yang harus disampai-

kan ke BPK. “Sebelum 60 hari harus selesai. Kami akan terus berkoordinasi dengan pihak BPK agar rekomendasi ini bisa diselesaikan secepatnya,” ungkapnya.

Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Barat, Joko Agus Setyono mengatakan, pihaknya setiap tahun melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah (pemda). Pemeriksaan tersebut juga mencakup pemeriksaan tujuan tertentu dan pemeriksaan kinerja. “Dari pemeriksaan-pemeriksaan itu, ada rekomendasi yang kami sampaikan kepada pe-

merintah daerah. Pemda wajib menindaklanjuti rekomendasi kami,” katanya.

Ada empat kategori rekomendasi. Pertama, rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti secara keseluruhan. Kedua, sudah ditindaklanjuti namun belum selesai atau belum sesuai. Ketiga, tidak atau belum ditindaklanjuti. Keempat, tidak bisa ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.

“Dari pemeriksaan-pemeriksaan yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya, ada akumulasi temuan atau akumulasi rekomendasi yang kita berikan,” tutupnya. (mse/r)